

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Rakyat atau semua Warga Negara Indonesia pada hakikatnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta, untuk dapat menyebarkan informasi yang sesuai dengan fakta maka seseorang akan melalui sebuah proses jurnalisme. Dalam jurnalisme terdapat salah satu komponen penting, yaitu wawancara. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai suatu kejadian. Dengan adanya jurnalisme setiap Warga Negara Indonesia akan mendapatkan informasi sesuai dengan kebenaran.

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Landasan hukum tersebut yaitu pertama, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Kedua, setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, mendapatkan pertemuan Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini dan menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan. Ketiga, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Keempat, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (KIP, 2018).

Isu-isu yang melibatkan pemerintah yang tidak transparansi terhadap penanganan pandemi Covid-19 terus berulang. Adapun contoh kasus pertama seperti, penilaian kinerja pemerintah terhadap transparansi informasi Covid-19. Irma Hidayana salah satu Koalisi Warga Lapor Covid-19 melaporkan bahwa penambahan kasus baru yang diumumkan oleh Pemerintah Pusat setiap harinya tidak mencerminkan kondisi yang sama di hari itu atau hari sebelumnya. Irma menuturkan bahwa publik tidak pernah tahu kapan penambahan kasus itu sebenarnya terjadi (Ariefana & Tanjung, 2020). Pada tahun 2021 pemerintah

kembali diminta terbuka, hal ini mengenai bisnis dibalik kebijakan tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bagi pelaku perjalanan yang terus berubah. Perubahan ini dapat dilihat dalam kebijakan waktu yang pemerintah tentukan. Pada tanggal 1 November tahun 2021 pemerintah kembali mencabut kebijakan syarat tes PCR sebagai salah satu syarat pelaku perjalanan moda transportasi udara Jawa-Bali, sedangkan kebijakan tersebut baru di keluarkan pada bulan Oktober. Selain dalam perubahan waktu, kebijakan harga yang ditetapkan pun berubah, setidaknya empat kali semenjak pandemi Covid-19 (Maesaroh, 2021).

Dengan adanya isu-isu tersebut publik perlu tahu mengenai kebenaran pada isu yang terus terjadi, kebenaran tersebut dilakukan dengan proses jurnalisme. Tujuan utama dari jurnalisme yaitu mencari kebenaran. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu berupaya untuk menginformasikan fakta melalui proses jurnalisme. Kasus lain yang mencerminkan kurangnya keterbukaan informasi pemerintah kepada publik yaitu mengenai pengesahan Undang-Undang cipta kerja (UU Ciptaker) yang disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 tengah malam. Para guru besar, dekan, dan sekitar 200 dosen dari 67 Perguruan Tinggi se-Indonesia menolak pengesahan UU Ciptaker karena prosedur dan materi muatannya sangat banyak bermasalah tetapi mengapa pemerintah terburu-buru mengesahkan sampai harus menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri-menteri. Profesor Susi Dwi Harijanti berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan (Novianto, 2020). Maka dari itu pemerintah sangat dituntut transparan kepada publik dan demi memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik.

Dalam kehidupan bernegara pemerintah memiliki kewajiban untuk merepresentasikan kebijakan publik kepada masyarakat umum. Media massa digunakan untuk menyampaikan pesan pemerintahan kepada masyarakat. Menurut Wahyuni “Dalam perspektif komunikasi politik demokratis, media massa dalam fungsinya sebagai infrastruktur politik berperan sebagai media komunikasi publik (*media of political communication*)” (Wahyuni, 2000).

Pada tanggal 28 September 2020 publik mendapat sebuah tontonan yang cukup berbeda dan belum pernah terjadi di Indonesia, dimana pada program “Mata Najwa”

Najwa Shihab sebagai *presenter* dan penanggung jawab acara melaksanakan wawancara dengan sebuah kursi kosong. Najwa Shihab sebagai pembawa acara biasanya berdialog dengan narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dalam tayangan ini, ia berdialog dengan objek yang tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan tanya jawab, yakni berdialog dengan sebuah kursi kosong. Sebuah kursi kosong yang berada tepat di depannya, seharusnya diduduki oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto.

Pada tayangan berdurasi 4 menit 22 detik, tayangan ini sudah ditonton sebanyak 4.8 juta kali oleh penonton pada kanal Youtube Najwa Shihab. Tidak hanya itu, perbincangan warganet juga memenuhi media sosial lain salah satunya pada Twitter. Dalam tayangan ini Najwa Shihab seolah-olah berdialog dengan Menteri Kesehatan Terawan dan mengutarakan seluruh pertanyaan yang telah direncanakan, hal ini merupakan bagian keresahan masyarakat selama ini. Salah satu pertanyaan yang ada di dalamnya adalah “Sejak awal pandemi anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar, apakah kini anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap?”.

Hal ini dilakukan karena pihak “Mata Najwa” sudah berkali-kali mengundang Menkes Terawan tetapi tidak kunjung memenuhi undangan yang diberikan (Prawira, 2020). Tujuan Menkes Terawan diundang ke Studio “Mata Najwa” dalam rangka membahas perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia secara keseluruhan. Wawancara kursi kosong yang dilakukan oleh Najwa Shihab ini merupakan salah satu bentuk untuk melakukan kritik terhadap pemerintah atas kurangnya transparansi penanganan Covid-19 di Indonesia.



Gambar 1.1 Tagar #MataNajwaMenantiTerawan dalam media sosial Twitter

(Sumber:Twitter.com/MataNajwa, 2020)

Dalam sudut pandang jurnalisme, proses wawancara ini bukanlah hal pertama dilakukan. Pada tahun 2012 di Negara Amerika Serikat hal serupa terjadi pada Lawrence O' Donnell dalam program *The Last Word with Lawrence O' Donnell* MSNBC. Ia seharusnya mewawancarai Craig Sonner (Pengacara dari pembunuh George Zimmerman) dari awal hingga akhir acara, tetapi di tengah acara Craig Sonner meninggalkan studio begitu saja. Lawrence merasa marah sekali karena Craig meninggalkan acara seakan-akan tidak bertanggung jawab, akhirnya Lawrence melanjutkan acara dengan mewawancarai kursi kosong yang sebelumnya merupakan kursi Craig (Fajriani, 2020).

Pada tahun 2019 di Inggris hal serupa pun terulang, Andrew Neil pada stasiun TV BBC rencananya mewawancarai seorang Perdana Menteri Borish Johnson. Johnson sudah diminta berkali-kali untuk memberikan pendapat tentang topik yang akan dibahas tapi pihak Johnson tak kunjung datang. Akhirnya Neil membawa acara dengan wawancara

kursi kosong di depannya dengan maksud agar Johnson berani untuk menyetujui wawancara mengenai topik yang sedang diangkat (Dewi, 2020).

Berdasarkan uraian di atas tayangan wawancara kursi kosong ini menjadi hal yang baru di Indonesia, selain sangat mencuri perhatian publik tayangan ini merupakan bagian dari aktivitas jurnalisisme serta disiarkan oleh seorang jurnalis terkemuka. Maka, secara pemaknaan isu hal ini sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengulas lebih spesifik isu yang sedang hangat diperbincangkan tersebut menggunakan pendekatan semiotika. Peneliti menilai dengan pendekatan semiotika dapat mendeskripsikan situasi di dalam acara tersebut dengan perspektif yang lebih menyeluruh, karena mencoba menggali selain dari sisi gambar yang terlihat tetapi dari segi pemaknaan yang mungkin disematkan dalam tayangan tersebut.

Tayangan kursi kosong ini dapat merepresentasikan berbagai makna, melalui sebuah objek kursi kosong. Makna-makna tersebut dapat memberikan asumsi dan pesan tersendiri terhadap penontonnya. Selain itu dalam bidang komunikasi, wawancara visual seperti ini sangat menarik perhatian peneliti kerana dapat memberikan makna seperti sarkasme, mengkritik, dan makna lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti sangat berfokus pada bagaimana tayangan “Mata Najwa” yang dikemas sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan kepada publik.

## **1.2 Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang, fokus pada penelitian ini adalah tayangan program “Mata Najwa” Episode *#MataNajwaMenantiTerawan* pada tanggal 28 September 2020.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yakni “Bagaimana tayangan Mata Najwa Episode *#MataNajwaMenantiTerawan* pada tanggal 28 September 2020 merepresentasikan kursi kosong sebagai Menteri Kesehatan Indonesia?”.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana tayangan “Mata Najwa” Episode *#MataNajwaMenantiTerawan* pada tanggal 28 September 2020 merepresentasikan kursi kosong sebagai Menteri Kesehatan Indonesia.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna untuk penelitian dengan tema yang sejenis selanjutnya serta menambah ilmu pengetahuan mengenai semiotika di dalam sebuah tayangan televisi.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang mendalam di bidang semiotika dalam tayangan televisi serta dapat memberikan informasi kepada seluruh pembaca.

## **1.6 Waktu dan Periode Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini mulai dari pra-riset hingga penelitian dalam kurun waktu 14 bulan, terhitung mulai dari bulan Maret 2021 hingga Mei 2022.